

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN KOPERASI  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM AMANAH MANDIRI DI  
SALATIGA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ANNISA ERINA AWWALIA**

**C100140375**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN KOPERASI PADA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM AMANAH MANDIRI DI SALATIGA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**ANNISA ERINA AWWALIA**

***C 100 140 375***

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Nuswardhani, SH., SU)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN**  
**KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN KOPERASI PADA KOPERASI**  
**SIMPAN PINJAM AMANAH MANDIRI DI SALATIGA**

Oleh:

**ANNISA ERINA AWWALIA**  
**C100140375**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 4 Juni 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, SH.,SU  
Sekretaris : SeptarinaBudiwati, SH., MH  
Anggota : Darsono, SH., MH


()  
()  
( )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. H. KhudzaifahDimiyati, SH., M.Hum)

...

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan.

Surakarta, 24 Mei 2018

Penulis

  
ANNISA ERINA A.

C 100 140 375

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN KOPERASI  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM AMANAH MANDIRI  
DI SALATIGA**

**ABSTRAK**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu badan usaha ekonomi yang bergerak dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana. Dimana dalam menjalankan tugasnya koperasi membutuhkan seorang karyawan. Karyawan merupakan seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses perjanjian kerja, peraturan serta hak dan kewajiban antara Koperasi dengan Karyawan, dan mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas, hukum dalam tanggungjawab hukum. Jenis penelitian ini deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja antara karyawan dengan Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum proses perjanjian kerja calon karyawan harus memenuhi persyaratan baik syarat administratif maupun syarat sah sebagai subjek hukum. Selanjutnya karyawan menyetujui isi perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak Koperasi yang mengatur antara lain tata tertib pekerjaan, jam kerja serta upah. Persetujuan antara karyawan dan koperasi ditandani dengan penandatanganan akta perjanjian kerja oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka perjanjian kerja tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dimana karyawan berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dan koperasi berkewajiban memenuhi hak karyawan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena kesalahan maka harus bertanggungjawab dengan dasar Wanprestasi dan dapat pula bertanggungjawab atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Kerja, Karyawan dan Koperasi**

**ABSTRACT**

*Credit Unions is an economic entity engaged in lending and fund raising. Where in carrying out their duties require a worker cooperative. Employee is someone who works for a wage or other forms of remuneration. This study aims to investigate the implementation of the employment agreement, the rules and rights and duties between the Cooperative Employees, and know the legal responsibility when one party made a mistake on the basis of tort or tort. The method used in this study is a normative method for this research to be studied are the rules of law, principles, legal liability. This study was descriptive, a study that is intended*

*to provide the data as accurately as possible in a systematic and thorough regarding legal liability to an agreement between the employee working with Credit Unions "Amanah Mandiri" Salatiga. These results indicate that prior to the employment agreement of candidates must meet the requirements of both the administrative requirements and requirements valid as a legal subject. Furthermore, the employees approved the agreement that has been prepared by cooperatives set up between laint order of work, hours of work and wages. The agreement between the employee and the signing of the deed ditandani cooperative working agreement by both parties. If both parties have agreed that the employment agreement with rights and obligations for both parties. Where the employee is obliged to carry out the work and the cooperative is obliged to fulfill the rights of employees. If either party does not enforce the agreement by mistake should be responsible on the basis of Default and may also be responsible on the basis of Torts.*

**Keywords:** *Liability, Employment Contracts, Employees and Cooperative*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam UU No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Selain untuk menjalankan roda ekonomi dimasyarakat koperasi juga bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya, tentunya untuk mencapai tujuan koperasi membutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi koperasi tersebut. Salah satunya perjanjian kerja antara karyawan dan koperasi. Perjanjian kerja itu menimbulkan hukum antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk karyawan maupun untuk pengusaha yang dalam pelaksanaan pasti ditemukan permasalahan.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi

kerja.<sup>1</sup> Istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja.<sup>2</sup>

Isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 51 (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2013, Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 sedangkan syarat formil diatur dalam pasal 54 UU No 13 Tahun 2003.<sup>4</sup>

Syarat sah nya perjanjian kerja berdasarkan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 itu mengadopsi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu<sup>5</sup>:

- a. Adanya sepakat
- b. Kecakapan berbuat hukum
- c. Hal tertentu, dan
- d. Causa yang halal.

Di dalam perjanjian kerja, pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan dapat diterima oleh pekerja. Namun pekerja mungkin memiliki pertimbangan dan pandangan tersendiri mengenai kebijakan perjanjian kerja. Sehingga dapat muncul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja.

---

<sup>1</sup>Asri Wijayanti , S.H., M.H, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 41

<sup>2</sup>Prof. Iman Soepomo SH, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. Ke-7, Djembatan, 1985, hal 53

<sup>3</sup> Asri Wijayanti , S.H., M.H, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 42

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid, hal 43

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha dalam Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga? (2) Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar peraturan atau perjanjian yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga?

Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami lebih jauh, proses perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha dalam Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga, untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar peraturan atau perjanjian yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis adalah dalam penelitian hukum ini adalah : (1) Manfaat untuk penulis yaitu menambah cakrawala ilmu khususnya dalam ilmu hukum ketenagakerjaan yang menyangkut tanggung jawab hukum mengenai perjanjian kerja. (2) Manfaat untuk masyarakat dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama. (3) Manfaat untuk bidang Ilmu Pengetahuan yaitu diharap mampu menambah kontribusi ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata mengenai hukum ketenagakerjaan.



## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Proses pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Karyawan**

Sebelum terjadinya perjanjian kerja calon karyawan harus melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu ada Syarat Tertulis dan Syarat Tidak Tertulis. Syarat Tertulis yaitu Surat Pertanggungjawaban orang tua/wali, SKCK dari kepolisian, Surat pernyataan dari calon karyawan, Ijasah terakhir asli, Foto 3x4, Fotokopi KTP orang tua/wali, SIM C, Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi calon pekerja yang sudah pernah bekerja di koperasi lain, dan jaminan kerja Rp 5.000.000,-. Kemudian untuk Syarat Tidak Tertulis sesuai dengan Ketentuan Hukum Perdata Indonesia bahwa pemohon telah berusia 21 tahun. Selanjutnya dari pihak Manager mengadakan analisa untuk menentukan apakah calon karyawan tersebut diterima oleh pihak Perusahaan dengan melihat beberapa aspek antara lain karakter atau sifat seseorang untuk meyakinkan perusahaan bahwa reputasi calon karyawannya baik dan tidak bermasalah.

Kemudian proses perjanjian kerja dilakukan dihadapan orang tua/wali sebagai saksi, manager dan calon karyawan. Sedangkan untuk karyawan kontrak bulanan dibuat dengan melibatkan Notaris yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan membuat Akta Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak serta disaksikan oleh Notaris guna keperluan legal di dalam

pelaksanaan perjanjian ataupun aktifitas yang menimbulkan hubungan serta akibat hukum bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait di dalamnya.

Dalam perjanjian kerja karyawan antara pihak Perusahaan dan pihak Karyawan harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Adanya suatu hal tertentu; 4) Adanya Kausa atau sebab yang halal.

Setelah kedua-dua pihak antara Koperasi dan Karyawan telah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian kerja pada koperasi simpan pinjam. Maka antara Koperasi dengan Karyawan telah terjadi perjanjian diantara keduanya. Pada saat perjanjian kerja dilakukan sebelumnya dengan kesepakatan bersama antara Perusahaan dan Karyawan telah membuat ketentuan mengenai perjanjian kerja tersebut yang disetujui oleh karyawan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sebagai karyawan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kesepakatan perjanjian kerja ini ditandai dengan penandatanganan oleh kedua-dua pihak.

Setelah kesepakatan terjadi maka kedua-dua pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja. Selama perjanjian kerja masih berlangsung maka karyawan harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Begitu juga dengan pihak perusahaan, selama perjanjian kerja berlangsung maka ia berkewajiban melaksanakan yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan apa yang berhak ia peroleh.

### **3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja antara Koperasi Simpan Pinjam dan Karyawan**

Setelah calon karyawan menyetujui isi perjanjian kerja tersebut maka persetujuan diantara keduanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua-dua pihak. Hak-hak perusahaan antara lain adalah sebagai berikut : Menerima keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan karyawan, menerima kembali harta perusahaan atau inventaris perusahaan yang dipinjamkan

kepada karyawan. Kewajiban perusahaan antara lain, yaitu : Memberi upah/gaji kepada karyawan, Memberikan pelatihan kepada karyawan, Memberikan jaminan keselamatan kepada karyawan. Sedangkan hak karyawan antara lain : Mendapatkan pelatihan dari pihak perusahaan; Mendapatkan akomodasi untuk biaya transportasi; Mendapatkan upah/gaji serta upah lembur; Mendapatkan tunjangan hari raya; Mendapatkan jaminan kerja. Sedangkan kewajiban karyawan: Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya; Wajib mentaati peraturan-peraturan yang ada; Mengembalikan uang kantor berdasarkan pinjaman; Mengembalikan inventari kantor.

Peraturan yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu : a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk melakukan hubungan hukum; c) suatu sebab tertentu; d) klausa yang halal. Kesepakatan antara kedua belah telah menimbulkan hubungan hukum dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak perusahaan antara lain adalah : a) menerima keuntungan dari pekerjaan karyawan, b) menerima kembali inventaris/harta perusahaan yang dipinjamkan kepada karyawan. Sedangkan kewajiban perusahaan antara lain : a) memberikan pelatihan kepada karyawan b) memberikan upah kepada karyawan. Begitupun dengan karyawan, ia juga memiliki hak serta kewajiban. Hak karyawan antara lain adalah mendapatkan upah dan kewajiban karyawan salah satunya adalah untuk menjaga dan merawat inventaris kantor serta mengembalikan uang milik koperasi.

### **3.3. Tanggungjawab Hukum Apabila Terjadi Kesalahan Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum**

Tanggungjawab Hukum muncul karena terjadi adanya kesalahan sebagai akibat dari perjanjian kerja yang telah disepakati didasarkan atas Kesalahan. Kesalahan yang sesuai di dalam perjanjian kerja berdasar Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu.

Tanggungjawab hukum muncul karena adanya kesalahan. Dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu tapi tidak sesuai. Dalam hal ini karyawan dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia dengan sengaja tidak merawat dan menjaga inventaris atau harta kantor yang dipinjamkan untuk digunakan dalam melaksanakan tugas dari kantor. Perbuatan karyawan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan yang berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata menimbulkan kewajiban bagi karyawan untuk memberikan ganti rugi dan berhak bagi perusahaan untuk menuntut ganti rugi.

Selain berdasarkan wanprestasi tanggungjawab hukum juga muncul karena adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini adalah tindakan karyawan yang dengan sengaja membawa uang kantor dengan jalan mengatasnamakan peminjam atau mendompleng nama peminjm untuk keperluan pribadi. Maka karyawan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diwajibkan untuk mengganti kerugian dan perusahaan berhak untuk meminta ganti rugi. Dalam hal ini apabila tidak ada etikat baik dari karyawan maka perusahaan berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

#### **4.1.1. Proses pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Karyawan**

Dalam proses perjanjian kerja antara perusahaan dalam hal ini koperasi simpan pinjam dan karyawan, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat baik syarat administratif maupun syarat perjanjian menurut hukum.

Pada saat terjadinya perjanjian kerja dimana karyawan menyetujui semua tata tertib dan peraturan yang ada maka keduaabelah pihak

melakukan kesepakatan dan persetujuan dengan ditandai dengan tandatangan kedua belah pihak didalam perjanjian kerja tersebut.

Selanjutnya setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak maka menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan adanya pelimpahan pekerjaan kepada karyawan oleh pihak perusahaan serta menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi karyawan maupun bagi pengusaha.

#### **4.1.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja antara Koperasi Simpan Pinjam dan Karyawan**

Peraturan yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk melakukan hubungan hukum; c) suatu sebab tertentu; d) klausa yang halal.

Kesepakatan antara kedua belah telah menimbulkan hubungan hukum dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitupun dengan karyawan, ia juga memiliki hak serta kewajiban.

#### **4.1.3. Tanggungjawab Hukum Apabila Terjadi Kesalahan Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum**

Tanggungjawab hukum muncul karena adanya kesalahan. Dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu tapi tidak sesuai. Dalam hal ini karyawan dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia dengan sengaja tidak merawat dan menjaga inventaris atau harta kantor yang dipinjamkan untuk digunakan dalam melaksanakan tugas dari kantor. Perbuatan karyawan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan yang menimbulkan kewajiban bagi karyawan untuk memberikan ganti rugi dan berhak bagi perusahaan untuk menuntut ganti rugi.

Selain berdasarkan wanprestasi tanggungjawab hukum juga muncul karena adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini adalah tindakan karyawan yang dengan sengaja membawa uang kantor dengan untuk keperluan pribadi. Maka karyawan tersebut diwajibkan untuk mengganti

kerugian dan perusahaan berhak untuk meminta ganti rugi. Dalam hal ini apabila tidak ada etikat baik dari karyawan maka perusahaan berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

Bagi pihak masyarakat yang akan bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dapat mengerti dan memahami kedudukan hukum dalam perjanjian kerja serta persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja tersebut.

Bagi pihak karyawan diharapkan untuk mengetahui kedudukannya dan tanggungjawab yang harus ia lakukan apabila melakukan kesalahan agar berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

Bagi pihak perusahaan diharapkan lebih tegas dalam memberikan hukuman dan sanksi kepada karyawan yang telah memalsukan identitas sebagai nasabah untuk mendapatkan uang yang akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan lebih kompeten dalam memberi penilaian terhadap karyawan serta memperketat pengawasan terhadap karyawan.

#### **PERSANTUNAN**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada : *Pertama*, Moch Faizin Syahrizal dan Dwi Handayani selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis. *Kedua*, adik-adik penulis Azky Shafa Salsabila dan Iqbal Ahmad Ghani yang selalu memberikan semangat kepada penulis. *Ketiga*, Ibu Nuswardani S.H.,SU selaku pembimbing penulis yang selalu sabar dan memberikan masukan dalam penulisan karya ilmiah untuk lebih baik. *Keempat*, sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar .Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumialdji, F.X. 2005. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harini. 2014. *Manajemen Koperas*, Surakarta; UNS Press
- Hendrojodi. 2000. *Koperas, Asaz-Asaz, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja.
- Husni, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja.
- R. Hadhikusumo, R.T Sutantya, Sumantoro. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, Imam. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djembatan
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jurnal :
- Hariati: “*Tinjuan Tentang Etika, Hak Dan Kewajiban Karyawan Dalam Perusahaan*”. Surakarta: STIE-AUB Surakarta.
- Nurul Latifah: “*Akuntansi Untuk Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam*”. Semarang: STIE-Semarang.
- Rahadian Dimas Aninditiya, Arik Prasetya dan Yuniadi Mayowan: “*Pengaruh Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak-Hak Karyawan Dan Kepuasan Kerja*”. 2015. Malang: Universitas Brawijaya
- Ristiani Gani Mendrofa “*Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum*”. 2014. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Undang-Undang:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi
- KUHPerduta